

---

## ALASAN RWANDA MEWUJUDKAN CASHLESS SOCIETY DI TAHUN 2024

Sesara Junita Noor<sup>1</sup>

**Abstract:** *Cashless society is an economic and cultural phenomenon whose application is inseparable from the role of patterns in business and economic activities that are carried out digitally. Cashless society can be a multiplier effect for changes in industrial behavior using technology that has started implementing the industrial revolution 4.0. Many countries that have implemented a cashless society experienced an increase in overall economic growth, both developed countries such as Sweden, which was the first country to implement a cashless society, and developing countries. Rwanda is one of the developing countries that will implement a cashless society in 2024, and since 2015 the Government of Rwanda has made various efforts to make it happen. This study aims to analyze Rwanda's interests in realizing a cashless society in 2024 where through the concept of national interests can be seen that Rwanda's interests are related to economic prosperity, specifically to improve people's standards of living and create a safe and developed Rwanda.*

**Keywords:** *Rwanda, Cashless Society, National Interest.*

### Pendahuluan

Pada era globalisasi berkembang industri finansial yang dikenal dengan *fintech* (*financial technology*). *Fintech* merupakan model bisnis moderat dengan pembayaran non tunai. Teknologi ini menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan pembayaran tunai serta mengarah kepada *cashless society* (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

*Cashless society* dapat didefinisikan sebagai masyarakat suatu negara yang dalam transaksi keuangannya tidak menggunakan uang dalam bentuk tunai namun memanfaatkan kartu kredit, kartu debit atau pembayaran digital menggunakan gadget berupa *mobile wallet* atau pembayaran dengan uang elektronik.

Metode pembayaran non tunai ini dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang pertama adalah faktor keamanan, karena dalam bertransaksi di berbagai macam tempat yang menyediakan fasilitas pembayaran non tunai tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak yang berisiko hilang atau dicuri. Yang kedua adalah lebih efektif, karena masyarakat dalam melakukan pembayaran tidak perlu memikirkan ketersediaan atau menunggu uang kembalian yakni pembayaran dibayar sesuai harga, dan yang terakhir adalah lebih efisiensi, karena waktu dalam bertransaksi berjalan lebih cepat.

*Cashless society* ini merupakan fenomena ekonomi dan budaya yang penerapannya tidak terlepas peran pola dalam bisnis dan aktivitas ekonomi yang dilakukan secara digitalisasi. *Cashless society* menjadi *multiplier effect* untuk perubahan perilaku industri menggunakan basis teknologi yang mulai menerapkan revolusi industri 4.0. Melalui revolusi industri 4.0 ini menciptakan pelaku ekonomi yang berinovasi dan kreatif, maka terlahirnya populasi *start-up* yang kuat menggunakan transaksi keuangan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: sesarajn@gmail.com

dengan sistem modern. Penerapan *cashless society* pada suatu negara dapat dipandang juga sebagai bentuk kemajuan budaya dan infrastruktur di negara tersebut. Terciptanya *cashless society* membuat pelayanan publik seperti pembayaran listrik, transportasi atau keperluan rumah tangga dilakukan pembayaran dengan digital.

*Cashless society* bukanlah hal yang baru. Pelaksanaannya sudah mulai diterapkan pada tahun 2011 dan terus berkembang di berbagai negara. Swedia adalah negara pertama yang mengaplikasikan hampir keseluruhan pembayaran digital dalam kehidupan masyarakatnya. Selain swedia, banyak negara maju yang juga sudah menjalankan sistem *cashless society*. Adapun negara maju yang telah menerapkan *cashless society* adalah Belanda pada tahun 2012, Perancis pada tahun 2012, Belgia pada tahun 2012, Jerman pada tahun 2012, Amerika Serikat pada tahun 2012, Kanada pada tahun 2013, Inggris pada tahun 2014, Australia pada tahun 2015, dan Korea Selatan pada tahun 2015 (Jayani, 2019).

Negara-negara berkembang juga tidak mau ketinggalan untuk mewujudkan *cashless society*. Beberapa negara berkembang yang telah menjalankan sistem *cashless society* diantaranya adalah Cina pada tahun 2010, Nigeria di tahun 2012, India di tahun 2014, dan Turki pada tahun 2016. Cina bahkan sudah membuktikan bahwa *cashless society* membawa manfaat satu diantaranya negara Cina yakni telah melaksanakan pembayaran sistem digital hampir keseluruhan lingkup kehidupan bisnis sebesar 95%. Hal ini memperlihatkan masyarakat Cina sudah tidak melaksanakan transaksi keuangan dengan uang tunai. Masyarakat Cina tidak perlu membawa dompet, cukup membawa *smartphone* untuk melakukan pembayaran digital. Manfaat yang diperoleh mengurangi risiko perampokan karena penduduk Cina dan para pedagang tidak lagi melakukan pembawaan uang secara tunai. Selain itu, berkurangnya peredaran uang palsu karena peredaran uang palsu sebelum *cashless society* sebagai permasalahan utama pada negara Cina.

Maraknya penerapan *cashless society* yang bahkan mulai diterapkan oleh negara berkembang tidak lain dikarenakan *cashless society* dapat menjadi salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membentuk sistem ekonomi yang baik. Hal ini juga didukung oleh perusahaan konsultan manajemen global McKinsey, yang menyebutkan bahwa jasa keuangan digital mampu berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan negara berkembang (Xinhua.net, 2017).

Negara berkembang lainnya yang sedang dalam proses mewujudkan *cashless society* adalah Rwanda. Rwanda berupaya mewujudkan *cashless society* dengan harapan memperoleh beragam manfaat dan mampu membantu percepatan bertumbuhnya ekonomi negara (Winata, 2019). Paul Kagame sebagai pemimpin negara Rwanda bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran negaranya. Salah satu fokus utama dalam pemerintahan Paul Kagame adalah mengubah basis ekonomi Rwanda, dari ekonomi yang berbasis pertanian atau agrikultur menjadi ekonomi berbasis pengetahuan atau *knowledge economy*.

*Knowledge economy* sendiri didasarkan pada kegiatan yang menambah pengetahuan, menciptakan ketergantungan yang lebih besar terhadap intelektual dibandingkan dengan tenaga fisik, memungkinkan adanya inovasi dan memberikan peran yang lebih besar bagi sumber daya manusia, juga meningkatkan distribusi dan kolaborasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Pettinger, 2017).

Perubahan basis ekonomi ini dilakukan oleh pemerintah Rwanda untuk membuat Rwanda berstatus *Middle Income Country* (MIC) dan *High Income Country* (HIC) di tahun 2035 dan 2050 mendatang (The World Bank, 2019). Berdasarkan tujuan

tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau *cashless payment*.

Sebagai negara kecil yang terkurung daratan yang tidak memiliki aset modal yang signifikan dan kemampuan untuk memperdagangkan produk dalam jumlah besar, Presiden Kagame berkomitmen untuk Rwanda menjadi pusat global yang dinamis untuk bisnis, investasi, dan inovasi. Hal ini mulai membuahkan hasil pada tahun 2018, ketika Rwanda berhasil menduduki peringkat terbaik kedua sebagai negara yang baik untuk melakukan bisnis di Afrika (Razali, 2020). *Knowledge economy* ini bersinergi pula dengan mendukung pergeseran sistem pembayaran di Rwanda menjadi *Cashless Society*.

Walaupun ekosistem *cashless society* ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi pertumbuhan Rwanda, pada kenyataannya tidak dapat memberikan hasil yang instan. Di masa awal implementasinya, Pemerintah Rwanda mengalami hambatan dan kendala seperti masih ada penduduk Rwanda yang tidak memiliki akses pada jasa keuangan sebesar 11%. Dari 89% masyarakatnya yang memiliki akses pada jasa keuangan, masih tersegmentasi lebih lanjut, sebesar 26% memiliki akun bank, 42% memiliki akun non-bank, sementara 21% lainnya adalah pengguna mekanisme informal yang tidak diatur oleh peraturan pemerintah (Skinner, 2017). Selain itu, menurut UNESCO, tingkat melek huruf penduduk Rwanda sebesar 73,2% pada seluruh masyarakat dengan usia di atas 15 tahun. Untuk penduduk melek digital berkisar 42.000 penduduk di tahun 2000 dan tahun 2010 menjadi 3,5 juta penduduk (UNESCO, 2018).

Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh Rwanda dalam mewujudkan *cashless society* dan berbagai upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan sistem tersebut, penulis bermaksud menganalisis alasan Rwanda dalam mewujudkan *cashless society* di tahun 2024.

## Kerangka Teori

### *Cashless Society*

Sistem pembayaran berupa uang setiap waktu makin terjadi perkembangan mengikuti berkembangnya zaman. Era teknologi maju membuat penduduk perlu melakukan penerapan *cashless society* atau *less cash society*. Prof. Leo Van Hove mengemukakan keadaan *less cash* sebagai usaha dalam pengurangan digunakannya alat pembayaran *cash*, sedangkan *cashless* sebagai usaha dalam dihilangkannya alat pembayaran *cash* dalam masyarakat. Fokus usaha *less cash* dan *cashless* berupa penggantian kebiasaan menggunakan alat pembayaran *cash* untuk transaksi pembayaran bersifat ritel (*micro payment*) dengan menggunakan alat pembayaran *non-cash* (Pramitha, 2019:141).

Uang (*money*) dipandang menjadi alat (*tool*) dan tidak hanya sebagai entitas fisik saja. Terciptanya konsep *less cash* atau *cashless* ini berdasarkan fakta berupa digunakannya uang tunai untuk transaksi diperlukan biaya yang banyak meliputi biaya perputaran, penerbitan, distribusi, perawatan dan penggantian uang yang rusak atau usang (Pramitha, 2019:141).

Pemakaian *cashless society* merupakan keadaan penduduk yang tidak berpersepsi uang sebagai suatu hal yang perlu memiliki wujud fisik berupa lembaran kertas atau koin. Sistem *cashless payment* membuat pembayaran dapat digunakan dengan aplikasi *financial technology*, berupa *e-wallet*, kartu debit dan kredit. Sistem pembayaran ini, membuat penduduk tidak lagi menggunakan uang digital namun berpindah menggunakan finansial secara digital.

Nikola Fabris (2019) dalam jurnalnya *Cashless Society-The Future of Money or A Utopia?* berargumentasi terkait manfaat dan kerugian dari *cashless society*. Nikola Fabris mengulas beberapa keuntungan dari *cashless society* sebagai berikut:

- a. Penghapusan uang tunai mengganggu aktivitas kriminal.
- b. Kenyamanan integrasi *Internet of Things* (IoT) dalam produk keuangan.
- c. Menurunkan *shadow economy*.
- d. Perkembangan teknologi yang mendukung *e-payment*.
- e. Keamanan pribadi yang lebih baik.
- f. Penghematan biaya dari penghapusan uang tunai.

Namun, terdapat pula kerugian dari *cashless society*, seperti yang diungkapkan oleh Fabris (2019):

- a. Masyarakat miskin dan penduduk lanjut usia masih bergantung pada uang tunai.
- b. Tingkat literasi keuangan yang belum merata.
- c. Masalah privasi yang cenderung mudah dilacak dengan integrasi sistem.
- d. Masalah tradisi atau kebiasaan dalam penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran tradisional.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional menjabarkan bahwa demi kelangsungan hidup suatu suatu negara, maka negara tersebut harus memenuhi kebutuhan negaranya atau mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan bejalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan. Hingga saat ini, konsep kepentingan nasional termasuk konsep yang populer dalam menganalisa permasalahan yang timbul dalam kajian hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku. Dengan adanya kepentingan nasional, maka suatu negara dapat mengarahkan kebijakan luar negerinya. Di samping itu pula, konsep kepentingan nasional merupakan dasar bagi suatu negara untuk menjelaskan perilaku luar negeri serta sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan politik luar negeri suatu negara. Konsep kepentingan ini sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan luar negeri (Pickles, 2001:18).

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Pickles (2001:127) mengungkapkan apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional sebagai politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara di dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang tujuannya untuk mencapai kepentingan nasional. Secara umum, kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, maka sarana yang dilakukan adalah melalui kebijakan politik setiap negara. Kebijakan dalam negeri suatu negara berhubungan dengan pemerintahan dengan rakyatnya, sedangkan kebijakan luar negeri terkait dengan kepentingan internasional.

Pada intinya, konsep kepentingan nasional yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para analis sering memakai konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara serta sebagai pengukur keberhasilan politik luar negeri suatu negara (Mas'ood, 1990:162).

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Prickles (2001:127) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman

para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling menjadi kebutuhannya secara umum. Termasuk di dalamnya *self-preservation* (mempertahankan diri), *independence* (kemerdekaan atau kemandirian), *military security* (keamanan militer), *territorial integrity* (keutuhan wilayah), dan *economic well-being* (kesejahteraan ekonomi).

Konsep kepentingan nasional di atas akan dijadikan pijakan penulis dalam menganalisis bahwa setiap negara memiliki kepentingan masing-masing atas negaranya, termasuk Rwanda juga memiliki kepentingan tersendiri untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Terkait dengan upaya perwujudan *Cashless Society* di Rwanda tahun 2024, jika ditinjau dari konsep kepentingan nasional, maka kepentingan nasional Rwanda dalam mewujudkan *Cashless Society* berorientasi pada *economic well-being* (kesejahteraan ekonomi).

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menganalisis alasan dari pemerintah Rwanda mewujudkan *cashless society* di Rwanda tahun 2024. Jenis dan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil interpretasi berbagai literatur seperti buku, majalah, tabloid, jurnal, internet dan jenis data sekunder lain yang saling berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan penjelasan lebih detail terhadap suatu informasi tertulis dengan menjelaskan fenomena yang terjadi, serta berisi analisis dari data-data yang berhasil dikutip.

### Hasil dan Pembahasan

Pada akhir 1990-an, Presiden Paul Kagame dan pemerintahannya mulai aktif merencanakan metode untuk mencapai pembangunan nasional. Dia meluncurkan proses konsultasi nasional dan juga meminta nasihat dari para ahli dari negara-negara berkembang termasuk China, Singapura, dan Thailand (Kinzer, 2008:226-227). Setelah konsultasi ini, dan tak lama setelah menjabat sebagai presiden, Kagame meluncurkan *Rwanda Vision 2020*. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyatukan rakyat Rwanda dan mengubah Rwanda dari negara yang sangat miskin menjadi negara berpenghasilan menengah.

#### A. Upaya-Upaya Pemerintah Rwanda Mewujudkan *Cashless Society*

Paul Kagame sebagai Presiden Rwanda, dalam beberapa kesempatan sejak naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2000, menyatakan keinginannya untuk mengubah Rwanda menjadi 'Singapura Afrika,' atau sebagai gerbang teknologi dan perdagangan yang stabil untuk seluruh benua Afrika (Njoroge, 2022). Visi ini kemudian diterjemahkan menjadi *Rwanda's Vision 2020* di tahun 2000. *Rwanda's Vision 2020* merupakan bentuk kesadaran pemerintah Rwanda akan pentingnya ICT. Secara khusus, Pemerintah Rwanda menciptakan program NICI untuk mempercepat Rwanda mencapai tahap industrialisasi.

Program ini terbagi kedalam beberapa periode waktu yang hingga saat ini masih terus berjalan, yakni *NICI Plan I (2000-2005)*, *NICI Plan Phase II (2006-2010)*, *NICI Plan Phase III (2011-2015)*, *NICI Plan Phase III+ (2013-2018)*, serta *NICI Plan Phase IV (2016-2020)* (Rwanda Gov. 2015). Berbagai program NICI yang dijalankan oleh pemerintah telah membawa sektor ICT Rwanda menjadi satu langkah lebih maju. Beberapa kemajuan dan keberhasilan program NICI antara lain di tahun 2013, penyedia layanan internet di Rwanda bertambah menjadi sepuluh dengan jumlah sekitar 1,2 juta

pengguna, setelah sebelumnya di tahun 2002 hanya ada dua penyedia layanan internet dengan total pengguna hanya 25,000. Program ini juga telah berhasil menjadikan Rwanda sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan internet tertinggi di Afrika, yakni sebesar 8,900% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan benua rata-rata sebesar 2,450%, serta rata-rata dunia sebesar 444%. Di tahun 2010, masyarakat Rwanda yang menjadi pelanggan telepon seluler meningkat, dari yang sebelumnya hanya 42,000 pada tahun 2000, menjadi lebih dari 3,5 juta di tahun 2010, di periode yang sama, pengguna internet juga ikut meningkat dari sebanyak 1,200 menjadi 493,900 pengguna. Melalui program ini, pemerintah juga telah berhasil mendistribusikan sebanyak 115,000 laptop untuk memfasilitasi siswa sekolah dasar di seluruh negeri. Hingga saat ini, pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan sektor TIK agar dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat Rwanda (Visit Rwanda, 2019).

Upaya Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan *Cashless Society* meliputi pengembangan berbagai sektor dan kerja sama dengan Lembaga-lembaga penyedia layanan komunikasi. Salah satu fokus utama pada penerapan *cashless society* ini adalah pada kemampuan sektor ICT. Khususnya dalam sektor ICT, globalisasi ICT telah memberikan cukup banyak dampak positif bagi negara-negara, seperti mendukung pertumbuhan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan layanan sektor publik maupun swasta, membantu negara-negara untuk mencapai tujuan sosio-ekonomi yang lebih luas dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya.

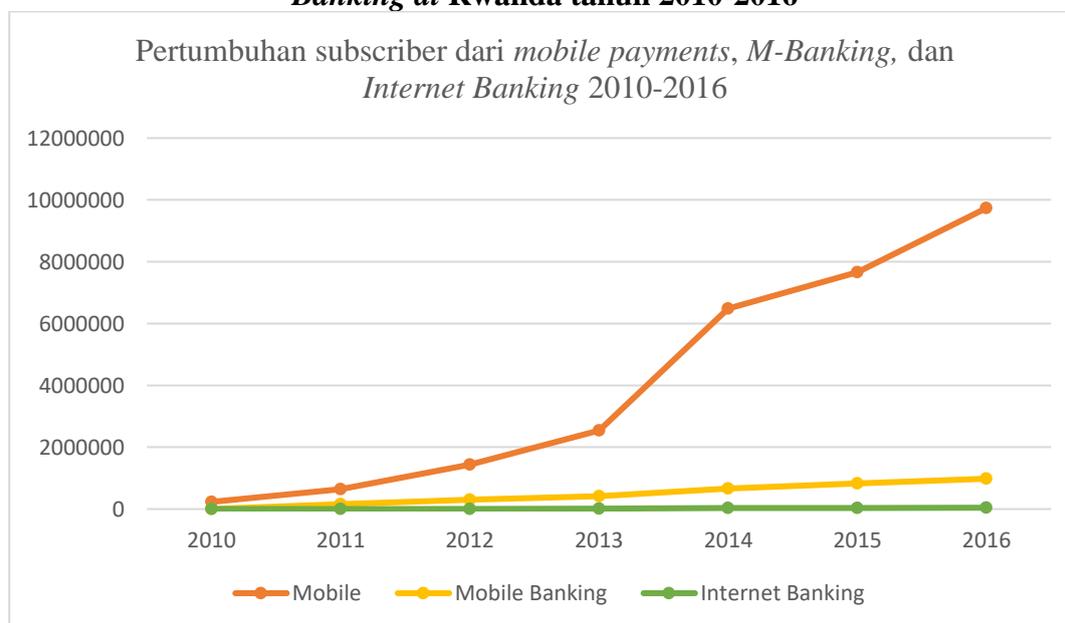
Berdasarkan data dari *Performance of the Rwanda National Payment System*, Sistem pembayaran elektronik di Rwanda berkembang pesat antara tahun 2012 dan 2016, Penerbitan kartu debit dan kredit mencatat pertumbuhan paling lambat, dibandingkan pelanggan *mobile banking* dan *mobile payment*. Berikut gambaran data penggunaan pembayaran non tunai dari tahun 2010 sampai 2016 di Rwanda:

**Tabel 1 Data Pembayaran Berbasis Kartu**

Infrastruktur	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah ATM	84	167	292	333	354	380	400
Jumlah Terminal POS	99	227	566	946	1.152	1.718	1.885
Jumlah Terminal POS untuk agen Bank	-	-	-	591	1.009	1.422	1.026
Jumlah Kartu Debit	41.377	115.200	389.269	487.498	638.869	657.904	746.458
Jumlah Kartu Kredit	172	516	418	845	2.540	3.485	3.668

Sumber: *Rwanda National Payment Strategy* (2018)

**Grafik 1 Pertumbuhan Subscriber dari *Mobile Payments, M-banking* dan *Internet Banking* di Rwanda tahun 2010-2016**



Sumber: *Rwanda National Payment Strategy* (2018)

Inklusi keuangan formal di Rwanda mencapai 68% pada tahun 2016 sementara inklusi keuangan informal mencapai 21% (FinScope, 2016). Lembaga keuangan formal mengeluarkan instrumen pembayaran digital (seperti kartu debit atau dompet seluler), sedangkan lembaga informal biasanya tidak. Jika dibandingkan dengan persentase orang dewasa yang termasuk secara formal, hanya 46% yang tampaknya memanfaatkan layanan digital, yang tergolong rendah. Dari pengguna Lembaga Keuangan Digital (LKD), 65% pengguna menggunakannya untuk pengiriman uang, 64% pengguna menggunakan LKD untuk pembayaran (terutama pembayaran pulsa), 44% pengguna menggunakan LKD untuk menabung secara digital, dan hanya 11% untuk mengakses pulsa.

Berdasarkan dua data yang ditampilkan di atas, inklusi keuangan di Rwanda meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dengan cukup signifikan. Tercatat penggunaan pembayaran non-tunai meningkat dengan drastic, inklusi keuangan Rwanda menyentuh 68% di tahun 2016. Perluasan akses keuangan di masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian Rwanda.

Rwanda menganggap inklusi keuangan sebagai pendorong integral untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengentasan kemiskinannya. Rwanda menargetkan pencapaian 90 persen inklusi keuangan formal pada tahun 2024., lantas pemerintah Rwanda berupaya untuk mewujudkan *Cashless Society* di tahun 2024.

Di Rwanda sendiri, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Kementerian Keuangan dan Perencanaan Ekonomi (MINECOFIN) bermitra dengan *Access to Finance Rwanda* (AFR) dalam Laporan Survei FinScope tahun 2020, sebuah survei yang mengukur bagaimana warga Rwanda inklusif secara finansial dan kemajuan yang dicapai untuk mempersempit kesenjangan. Tujuan utama Survei FinScope Rwanda 2020 adalah untuk menunjukkan tingkat inklusi keuangan, menentukan lanskap akses, mengidentifikasi pendorong, dan hambatan terhadap akses keuangan, dan menilai tren atau perubahan dari waktu ke waktu dan memberikan informasi tentang peluang baru untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Menurut survei FinScope tahun 2020, sebanyak 93% orang dewasa Rwanda termasuk dalam persyaratan keuangan mengakses dan menggunakan produk keuangan formal dan informal. Angka ini telah meningkat jauh dari 89% pada tahun 2016, 72% pada tahun 2012, dan 48% pada tahun 2008. Tingkat inklusi keuangan bervariasi dari 99% di distrik Gasabo hingga sekitar 83% di distrik Rusizi (MINECOFIN, 2020)

Survei menunjukkan kesenjangan gender yang menyempit dalam inklusi keuangan dengan hanya 8% wanita yang dikecualikan dibandingkan dengan 7% pria. Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa kaum muda dalam rentang usia 16-24 tahun, paling banyak tersisihkan secara finansial sebesar 18%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 7%.

Sekitar 77% populasi Rwanda mengakses dan menggunakan produk keuangan formal, termasuk yang disediakan oleh sektor perbankan dan lainnya dari lembaga keuangan formal tetapi bukan bank seperti perusahaan asuransi, operator jaringan seluler, lembaga keuangan mikro/SACCO, dan lain-lain.

Sekitar 36% (dari 26% pada tahun 2016, 23% pada tahun 2012 dan 14% pada tahun 2008) orang dewasa di Rwanda memiliki rekening bank. Proporsi orang dewasa yang ditagih berkisar dari 80% di distrik Gasabo hingga hanya 8% di distrik Ngororero. Pertumbuhan populasi bank telah meningkat sebesar 1,1 juta sejak 2016. Sekitar 25% orang dewasa yang menggunakan bank menggunakan alat keuangan digital naik dari 6% pada tahun 2016. Sekitar 75% orang dewasa di Rwanda menggunakan produk/layanan keuangan formal (non-bank) lainnya. Layanan keuangan ini meningkatkan tingkat inklusi formal secara keseluruhan (MINECOFIN, 2020).

Alasan dari pemerintah Rwanda bertujuan untuk mewujudkan *cashless society* di Rwanda pada tahun 2024 tidak terlepas dari kepentingan nasional untuk kesejahteraan ekonominya. merupakan untuk membangun negaranya dengan lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia. Pertimbangan keuntungan yang melebihi dari kerugian yang akan didapatkan, serta pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan, membuat pemerintah Rwanda memutuskan untuk mewujudkan *cashless society* di Rwanda.

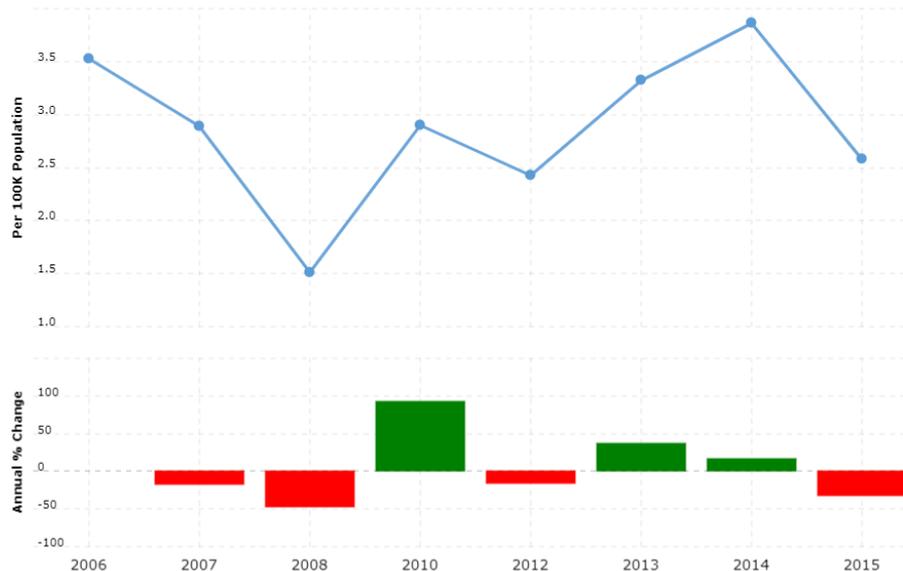
## **B. Kesejahteraan Ekonomi sebagai Alasan Pemerintah Rwanda Mewujudkan *Cashless Society* di Rwanda Tahun 2024**

Ditinjau dari manfaat serta kerugian dari *cashless society*, (Fabris,2019) Keuntungan dan kerugian ini didasari dari fakta dibalik besarnya keterlibatan sektor teknologi informasi ekosistem *cashless society*, serta kebutuhan atas kemampuan masyarakat dalam mengoperasikannya. Pertimbangan manfaat dan kerugian ini menjadi argumentasi utama dalam alasan pemerintah Rwanda dalam mewujudkan *Cashless Society* di tahun 2024. Penghapusan uang tunai dapat sangat mengganggu aktivitas kriminal, terutama yang terkait dengan narkoba dan pencucian uang. Kegiatan ini hampir tidak dapat dilakukan tanpa uang tunai, sedangkan uang tunai tidak dapat dilacak. Hal ini merupakan fakta yang sangat menguntungkan bagi para kriminal. Transisi ke *Cashless Society* juga akan membuat pemalsuan uang hampir tidak mungkin dilakukan. Sebuah studi di AS menemukan bahwa peningkatan transaksi tanpa uang tunai telah menyebabkan penurunan pencurian dan tingkat kejahatan secara keseluruhan (Achord, et. al, 2017). Hal ini juga berkaitan dengan masalah keamanan pribadi, individu yang memiliki uang tunai dalam jumlah besar atau menyimpan uang tunai di rumah dapat menjadi korban perampokan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian materi dan keselamatan pribadi yang terancam. Oleh karena itu, berkurangnya aktivitas

kriminal sebagai dampak dari perwujudan *cashless society* ini diharapkan dapat membuat Rwanda menjadi sebuah negara yang aman.

Tercatat oleh *World Bank* pada *World Development Indicators*, tingkat kriminalitas di Rwanda sebesar 3,53 per 100 ribu populasinya. Setelah sempat mengalami penurunan hingga menjadi 1,51 per 100 ribu populasi pada tahun 2008, angka ini meningkat pertahunnya hingga pada puncaknya di tahun 2014 dengan tingkat kriminalitas sebesar 3,86 per 100 ribu populasi, dan berhasil ditekan pada tahun 2015 menjadi 2,58 per 100 ribu populasi.

Grafik 2. Tingkat Kriminalitas di Rwanda Tahun 2006-2015



Sumber: *World Development Indicators – Rwanda (2023)*

*Cashless Society* juga dapat menurunkan *shadow economy*, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, dengan hasil akhir penguatan stabilitas fiskal. Sebagian besar perdagangan *shadow economy* saat ini mencakup transaksi yang tidak dilaporkan yang seharusnya dikenakan pajak. Dengan transisi ke *cashless society*, transaksi ini akan memasuki arus legal dan dikenakan pajak. Ini akan meningkatkan pendapatan publik, dengan efek domino menurunkan defisit fiskal dan utang publik.

Pergerakan dunia yang mengedepankan pesat teknologi IT yang pesat, *smartphone*, dan aplikasi elektronik mendukung *e-payment*. Perkembangan masyarakat digital telah membawa peningkatan dalam pembayaran digital. Ponsel semakin menjadi sejenis dompet digital, dan semakin banyak aplikasi dan layanan digital yang hanya dapat dibayar secara elektronik. Hal ini membuat Rwanda yang pernah menjadi negara dengan tingkat literasi yang rendah dan merupakan negara yang tidak maju, memberikan dukungan serta mendorong masyarakatnya agar dapat berkompetisi dengan negara lainnya di era digital.

Bagi negara berkembang seperti Rwanda, akan sangat sulit untuk dapat mengejar ketertinggalan yang dihadapi tanpa mengutamakan efektifitas dan efisiensi. *Cashless society* dapat menimbulkan penghematan biaya, yang berasal dari bank, serikat kredit, dan lembaga keuangan lainnya mengurangi staf karena tidak lagi menggunakan uang tunai. Hal Ini juga akan mengurangi biaya yang terkait dengan penanganan uang. Faktanya, banyak bank yang mendorong untuk penggunaan *e-banking*, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah cabang bank, karyawan, dan jam kerja yang

dipersingkat. Selain itu, produksi dan logistik uang tunai seperti pencetakan uang, transportasi, dan penyimpanan yang dapat menimbulkan biaya yang signifikan.

Rwanda masih melakukan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Visi *cashless society* Rwanda tahun 2024. Langkah-langkah pemerintah juga telah dilakukan melalui berbagai tindakan, baik secara domestik maupun internasional dalam mewujudkan sebuah *cashless society* di Rwanda. Secara domestik, Pemerintah Rwanda mengeluarkan kebijakan *The New Investment Law of 2015* pada Mei 2015, mengeluarkan *Rwanda's Payment System Strategy: Towards a Cashless Rwanda 2018-2024* di tahun 2018, serta adanya kehadiran media *The New Times*. Sedangkan secara internasional, Pemerintah Rwanda berusaha untuk meningkatkan pelayanan MTN MobileMoney, membangun kerja sama dengan Andela Contract, membangun KIC, serta terpilih menjadi Dewan ITU.

Secara khusus *cashless society* membantu Rwanda berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sektor Teknologi Komunikasi dan Informasi khususnya mencapai target di tahun 2035 sebagai bagian dari negara-negara yang tergabung dalam golongan *Middle Income Country* (Rwanda Govt, 2015). Melalui pembangunan infrastruktur sektor teknologi komunikasi dan informasi ini, akan tercipta akses kepada produk-produk keuangan seperti pembayaran non tunai, penggunaan gadget dan *mobile wallet* melalui kerja sama dengan layanan telekomunikasi yang diatur lebih lanjut dalam *Rwanda Payment System Strategy* yang diterbitkan oleh Bank Nasional Rwanda.

Perwujudan *Cashless Society* di Rwanda tahun 2024 merupakan upaya untuk *economic well-being* (kesejahteraan ekonomi). Pemerintah Rwanda melihat sistem *cashless society* dapat menghemat waktu ketika sistem pembayaran dapat terlaksana cepat dan baik yang tidak perlu adanya uang tunai, yakni pembayaran cukup digunakan kartu atau *mobile wallet* yang mudah digunakan. *Cashless society* bagi pemerintah Rwanda dapat memungkinkan terjadinya penghematan biaya pencetakan uang tunai dan meningkatkan sumber daya di lembaga keuangan. Hal ini diharapkan mampu mendukung banyaknya investasi yang masuk, peningkatan perputaran uang dan, banyaknya aktivitas bisnis, terciptanya peluang kerja dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto tahunan (Xinhua.net, 2017).

Tercatat oleh IMF, dalam *Sixth Review Under the Policy Coordination Instrument and Monetary Policy Consultation Clause-Press Release; Staff Report; And Statement by The Executive Director for Rwanda*, walaupun terdampak oleh pandemi Covid-19, Pemulihan ekonomi Rwanda tetap kuat pada kuartal pertama tahun 2022. Setelah sebelumnya PDB Rwanda berkurang sebesar 3,4 persen pada tahun 2020, PDB riil pulih dengan kuat menjadi 10,9 persen pada tahun 2021, didukung oleh sektor pertanian yang baik dan pemulihan yang kuat terkhusus di sektor industri dan jasa. Indikator frekuensi tinggi juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat pada kuartal pertama 2022 tanpa gangguan ekonomi besar akibat perang di Ukraina (IMF, 2022).

Dalam laporan yang sama, tercatat PDB Rwanda di tahun 2019 naik 9,5 % dari tahun sebelumnya, menjadi 10,36 Miliar USD dari tahun 2018 sebesar 9,462 Miliar USD. Walaupun PDB Rwanda sempat mengalami penurunan 3,4 % di tahun 2020 dengan PDB sebesar 10,18 Miliar USD, PDB Rwanda kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 11,07 Miliar USD, atau pulih 10,9 % dari tahun sebelumnya (World Bank, 2021). Dari perkembangan PDB Rwanda, dapat ditarik pula kesimpulan bahwa *cashless*

*society* yang mulai diterapkan membawa manfaat yang baik bagi perkembangan ekonominya.

Rwanda juga pernah tergolong sebagai negara paling tidak berkembang oleh IMF di tahun 2019 lalu, sehingga terwujudnya *cashless society* membuat Pemerintah Rwanda berharap menjadi salah satu negara teraman di Afrika dan kondisi politik yang stabil, yang dapat berdampak positif, walaupun begitu, PDB di Rwanda mencapai USD 822 per kapita, atau 11,07 miliar USD untuk seluruh negara, membuat Rwanda masih sebagai salah satu negara yang ekonominya masih kecil dan berada di peringkat 146 pada tahun 2021 lalu (Worlddata.info, 2021).

Rwanda adalah salah satu negara terkecil tetapi terpadat di Afrika. Jumlah penduduk masih terus bertambah, dari 2,1 juta pada tahun 1950 menjadi 13,1 juta pada tahun 2021. Lebih dari dua pertiga penduduk tinggal di pedesaan. Dengan demikian, sebagian besar penduduk serta perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian. Pemerintah mengelompokkan sebanyak mungkin orang dalam koperasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi modern di sektor pertanian. Namun, langkah terakhir ini membuat semakin banyak petani menganggur.

Peluang kerja alternatif di perusahaan komersial di tanah milik negara, di bidang pertanian dan pertambangan hanya akan mengimbangi sebagian dari hal ini. Populasi yang tinggal di ibu kota dan kota-kota lain semakin meningkat. Implementasi dari *Rwanda Vision 2020* adalah proses yang berjalan lambat. Pekerjaan ringan di industri telah muncul, terutama diciptakan oleh investasi swasta asing. Di kota-kota, terutama di ibu kota Kigali yang berkembang pesat, mayoritas penduduknya bekerja di bidang pelayanan sosial, transportasi dan perdagangan, konstruksi dan utilitas, keuangan dan *real estate*. Sekelompok kecil kelas menengah dan keatas, sekitar 10% dari populasi terdiri dari pegawai negeri, tentara, pejabat partai, profesional dan pemimpin bisnis, kelas dengan sebagian besar satu etnis, bias yang muncul dari pergolakan tahun 1994 dan yang memiliki diuntungkan dan akan terus diuntungkan dari kebijakan pemerintah (Bertelsmann Stiftung, 2022:15).

Angka kemiskinan di Rwanda juga terus menurun. Data kemiskinan terbaru berasal dari tahun 2017. Pada tahun 2017, angka kemiskinan berada di 37%, berbeda jauh dibandingkan dengan 60% pada tahun 2001. Kemiskinan ekstrem juga menurun, sebesar 16,0% pada 2017. Namun penurunan ini terutama disebabkan oleh pembangunan di ibu kota Kigali yang memiliki tingkat kemiskinan hanya 13,8% (Bertelsmann Stiftung, 2022:15).

Upaya pemerintah untuk mempromosikan inklusi dan memerangi ketidaksetaraan di seluruh sektor dengan memberlakukan kebijakan pro-kaum miskin dan menekankan pada kebutuhan keamanan manusia. Pemerintah diharapkan dapat menghilangkan hambatan sosial yang ada dan mengakui bahwa pekerjaan baru bagi orang-orang yang kurang terampil di sektor formal sama pentingnya dengan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan untuk kelas menengah dan atas.

Lebih lanjut, untuk mengejar *economic well-being*, yang dilakukan melalui modernisasi perekonomiannya (*knowledge based-economy*), pendidikan dan pelatihan teknis menjadi prioritas bagi pemerintah. Pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan mencapai 3,1% dari PDB pada tahun 2018. Pada tahun 2020, angka partisipasi murni sekolah dasar meningkat menjadi 99%, dengan tingkat penyelesaian sebesar 97,4%. Pihak berwenang berkomitmen untuk memberikan pendidikan kepada orang miskin. Pendaftaran di sekolah menengah meningkat dua kali lipat, dan jumlah guru hampir tiga

---

kali lipat. Dari seluruh siswa yang memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi, sebanyak 25% siswa tersebut menerima beasiswa pemerintah, sementara yang lain memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Peningkatan jumlah sekolah kejuruan juga menjadi prioritas. Memperkuat pendidikan teknis dan kejuruan akan memastikan bahwa pasar tenaga kerja menawarkan keterampilan yang tepat yang dibutuhkan oleh ekonomi modern (Bertelsmann Stiftung, 2022:25). Perbaikan dalam pendidikan dan penelitian dilihat oleh pemerintah sebagai prasyarat yang sangat diperlukan untuk modernisasi negara.

### **Kesimpulan**

Alasan Pemerintah Rwanda berupaya untuk mewujudkan *cashless society* pada tahun 2024 adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu kesejahteraan ekonomi, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan Rwanda yang aman dan maju. Untuk mendukung perwujudan *cashless society*, dan menghadapi kendala-kendala yang dimiliki oleh Rwanda, Pemerintah Rwanda melakukan pembangunan infrastruktur melalui program *National Information Communication Infrastructure* (NICI) yang diadopsi dari *Rwanda's Vision 2020* untuk secara khusus membantu negara berfokus pada pembangunan infrastruktur sektor ICT dan mempercepat Rwanda menjadi sebuah negara industrialisasi. Melihat dari tingkat kriminalitas yang menurun, literasi keuangan dan pendidikan yang meningkat, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya, keputusan Rwanda untuk mewujudkan *cashless society* merupakan langkah yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Rwanda.

## Daftar Pustaka

- Achord, et.al. 2017. *A Cashless Society – Benefits, Risks, and Issues*. Institute and Faculty of Actuaries
- Bertelsmann Stiftung. 2022. *BTI 2022 Country Report-Rwanda*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2022, tersedia di: [https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country\\_report\\_2022\\_RWA.pdf](https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_RWA.pdf)
- FinScope 2016, Rwanda, *Digital Financial Services in Rwanda*. Tersedia di: [https://afr.rw/IMG/pdf/finscope\\_digitalfinancial\\_services.pdf](https://afr.rw/IMG/pdf/finscope_digitalfinancial_services.pdf)
- IMF. 2022. “*Sixth Review Under the Policy Coordination Instrument and Monetary Policy Consultation Clause—Press Release; Staff Report; And Statement By The Executive Director for Rwanda*”, tersedia di: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1RWAEA2022002.ashx>
- Jayani, Dwi Hadya. 2019. Negara Pengguna Sistem Pembayaran Non-tunai Terbesar di Dunia, tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/negara-pengguna-sistem-pembayaran-non-tunai-terbesar-di-dunia>
- Mas’oed, Mochtar. 1991. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta
- National Bank of Rwanda. 2018. “*Rwanda Payment System Strategy*”, tersedia di: <https://www.bnr.rw/payment-systems/policies>
- Nikola Fabris, 2019. *Cashless Society-The Future of Money or a Utopia?* <https://sciendo.com/article/10.2478/jcbtp-2019-0003>,
- Njoroge, June. 2022. *Africa: Becoming Africa's Singapore - Rwanda Banks On Technology to Rebuild Its Economy*, The Exchange: Africa’s Investment Gateway, tersedia di: <https://allafrica.com/stories/202211020073.html>
- Kinzer, Stephen (2008). *A Thousand Hills: Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed it* (Hardcover ed.). Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-12015-6.
- Pettinger, Tevjan. 2017. “*The knowledge economy*”. Economics Help, tersedia di: <https://www.economicshelp.org/blog/27373/concepts/the-knowledge-economy/>
- Pickles, Dorothy. 2001. *Pengantar Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Pramitha. 2019. “*Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel*”. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Razali, Hafidzi. 2020. “*Laying the foundations for Rwanda’s new knowledge economy*”. Oxford Policy Fellowship
- Rwanda Gov. 2015. *National ICT Strategy and Plan NICI – 2015*. [https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/National\\_Strategies\\_Repository/Rwanda%20NICI%20NICI\\_III.pdf](https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/National_Strategies_Repository/Rwanda%20NICI%20NICI_III.pdf)
- Skinner, Chris. 2017. “*Rwanda-Africa’s first cashless economy?*”, tersedia di: <https://banknxt.com/62332/rwanda-cashless-economy/>
- Tazkiyyaturrohmah, R. 2018. “*Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*”. *Muslim Heritage*, 3(1),

- The World Bank, The World Bank in Rwanda. The World Bank 30 September 2019, tersedia di: <https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/overview>
- UNESCO. 2018. *Rwanda - Education and Literacy*, tersedia di: <http://uis.unesco.org/en/country/rw>
- Visit Rwanda. 2019. *ICT Infrastructure*. tersedia di: <https://www.visitrwanda.com/investment-opportunities/ict/>
- Winata, Helen. 2019. "Upaya Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan cashless society pada era globalisasi digital (2015-2018)". Jurnal Universitas Katolik Parahyangan.
- World Bank. 2021. "World Development Indicators-Rwanda", tersedia di: <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators>
- World Development Indicators – Rwanda, 2023, tersedia di: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>
- XinHuaNet. 2017. *Rwanda steps up campaign to go cashless*, tersedia di: [http://www.xinhuanet.com/english/2017-11/16/c\\_136757709.html](http://www.xinhuanet.com/english/2017-11/16/c_136757709.html)